

**PERAN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2024
KELURAHAN KASEMEN KOTA SERANG**

***THE ROLE OF GOVERNMENT APPARATUS IN IMPROVING POLITICAL
PARTICIPATION IN THE 2024 ELECTIONS KASEMEN DISTRICT, SERANG CITY***

**¹Muhammad Akbar Maulana, ²Yusa' Farchan, ³Aprilia Sapira, ⁴Fahmi Amanatul
Hanif, ⁵Faiz Izzuddin**

*^{1,2,3,4,5}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pamulang Kota Serang
Jl. Raya Jakarta Km 5 No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183*

Email: ipemserang@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini berjudul “Peran Aparatur Pemerintah Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 Kelurahan Kasemen Kota Serang”. Pembahasan mengenai peran aparatur pemerintahan Kelurahan menjadi penting untuk ditekankan mengingat masih cukup rendahnya tingkat partisipatif masyarakat terhadap agenda politik pemilihan kepala daerah. Pendidikan politik utamanya kepada masyarakat penting untuk ditekankan pelaksanaannya apalagi di tahun-tahun politik menjelang Pilkada 2024. Metode yang digunakan adalah observasi dan forum group discussion (FGD) dengan memberikan stimulasi pemahaman mengenai urgensi pendidikan politik dan kewarganegaraan kepada peserta kegiatan yang terdiri dari pemuda/i dan masyarakat di Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Kegiatan ini akan diikuti oleh 100 peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Pemberian Pendidikan politik dari Aparatur Kelurahan kepada warga masyarakat bertujuan untuk memiliki pengetahuan politik yang cukup dalam merespon berbagai isu dan kebijakan politik mendasar utamanya mengenai Pemilihan Kepala Daerah 2024. Dalam FDG, peserta dan aparatur pemerintahan kelurahan Kasemen didorong untuk aktif mengadakan kegiatan-kegiatan dan dialog yang membangun guna mengembangkan pengetahuan dan partisipasi politik kepada warga masyarakat. Hasil temuan dan kesimpulan yang didapat dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah peran aparatur kelurahan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terkait pilkada yang sudah berjalan baik, namun pendidikan politik masyarakat masih belum seimbang dengan tingkat pengetahuan akan partisipasi politik masyarakat, sehingga diperlukan pendampingan secara berkala dan intens oleh aparatur pemerintahan kelurahan kasemen untuk menghindari tingginya Golput pada Pilkada 2024 di Kelurahan Kasemen.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Kelurahan, Partisipasi Politik, Pilkada 2024

ABSTRACT

This community service is entitled "The Role of Subdistrict Government Apparatus in Increasing Political Participation in the 2024 Regional Election in Kasemen Subdistrict, Serang City". It is important to emphasize the discussion regarding the role of sub-district government officials considering that the level of community participation in the political agenda for regional head elections is still quite low. It is important to emphasize its implementation, especially in the political years leading up to the 2024 regional elections to the community, especially in the political years leading up to the 2024 regional elections. The methods used are observation and forum group discussions (FGD) by providing stimulation of understanding regarding the urgency of political and civic education to activity participants consisting of young people. and the community in Kasemen Village, Kasemen District, Serang City, Banten Province. This activity will be attended by 100 participants from various levels of society. Providing political education from the Village Apparatus to community members aims to have sufficient political knowledge in responding to various fundamental political issues and policies, especially regarding the 2024 Regional Head Election. In the FDG, participants and Kasemen sub-district government officials are encouraged to actively hold activities and dialogue that building to develop knowledge and political participation among community members. The findings and conclusions obtained from this community service are the role of sub-district officials in increasing community awareness regarding regional elections which have gone well, but community political education is still not balanced with the level of knowledge of community

political participation, so regular and intense assistance is needed by officials Kasemen sub-district government to avoid high abstentions in the 2024 regional elections in Kasemen sub-district.

Keywords : *Role, Subdistrict Government, Political Participation, 2024 Regional Election*

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Melalui Pemilu, kedaulatan rakyat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi utama Pemilu adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka yang dipercaya. Wakil-wakil ini memiliki peran krusial dalam menjalankan urusan pemerintahan, yang meliputi pembuatan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, serta pemilihan pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat (Risnain, 2012).

Demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang memungkinkan seluruh rakyat berpartisipasi dalam proses pemerintahan melalui perwakilan mereka. Esensi dari demokrasi terletak pada prinsip bahwa pemerintahan dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan atas nama rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan arah dan kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui para wakil yang mereka pilih (Putuhena, 2013).

Prinsip-prinsip dasar demokrasi yang pertama adalah pemerintah dari rakyat, yang artinya kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Kedua, pemerintah oleh rakyat yang artinya rakyat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan, baik melalui pemilihan umum maupun partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Ketiga adalah pemerintah untuk rakyat yang tujuan utama pemerintahan adalah untuk melayani kepentingan rakyat. Kebijakan dan keputusan yang diambil harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi aspirasi rakyat (Ilham, 2012). Dengan demikian, demokrasi memastikan bahwa pemerintahan tetap responsif dan akuntabel terhadap rakyat, sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, adil, dan inklusif.

Sistem pemerintahan yang demokratis hingga saat ini masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam kehidupan sosial dan bernegara. Dalam sistem demokrasi, semua individu diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa diskriminasi. Beberapa aspek penting dari sistem pemerintahan demokratis meliputi hak berpolitik, dimana setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat dalam pemilihan umum. Ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian adalah hak memilih dengan demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemilihan umum yang bebas dan adil (Stone, 2012). Melalui pemilihan umum, rakyat dapat menentukan siapa yang akan mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah hak berpendapat dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat dijamin dan dihormati. Warga negara dapat menyuarakan pandangan dan opini mereka secara bebas tanpa takut akan penindasan atau pembalasan. Dan yang terakhir adalah hak melakukan koreksi atas pemerintahan, melalui sistem demokrasi juga memberikan hak kepada warga negara untuk mengawasi dan mengkritik pemerintah. Mekanisme seperti demonstrasi, petisi, dan media independen memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah (Putuhena, 2013).

Pergantian kepemimpinan merupakan salah satu keniscayaan dalam sistem demokrasi yang menuntut keterlibatan aktif dari warga negara. Dalam konteks ini, kelurahan sebagai miniatur dari pemerintahan negara memainkan peran penting. Masyarakat kelurahan, yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, menjadi fondasi kuat bagi implementasi demokrasi di tingkat local (Huntington, S.P., & Nelson, 1994). Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya peran kelurahan dalam pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan. UU ini membawa paradigma baru yang mengakui bahwa perubahan signifikan dalam bidang ekonomi, pembangunan, dan kebijakan politik tidak hanya dapat dimulai dari kota, tetapi juga dari kelurahan. Pembangunan berbasis kelurahan dengan pendekatan pembangunan yang dimulai dari kelurahan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Kelurahan diberikan anggaran dana kelurahan yang signifikan untuk mendukung berbagai program

pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan (Sholikin, 2013).

Partisipasi masyarakat melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat kelurahan. Selanjutnya adalah penekanan terhadap transparansi dan akuntabilitas, dimana pemerintahan kelurahan diwajibkan untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kelurahan, sehingga penggunaan dana kelurahan dapat diawasi oleh masyarakat (Budiyono, 2019). Penerapan UU Kelurahan, diharapkan pembangunan Indonesia dapat dimulai dari tingkat yang paling dasar, yakni kelurahan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat basis ekonomi dan sosial kelurahan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelurahan, sehingga tercipta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Didalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Pada Pasal 14 huruf C yang berbunyi “Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat” menandakan bahwa perlu adanya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada, karena rakyat berperan atau berpengaruh sangat penting untuk berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Baidhawiy, 2014).

Pemilihan umum tidak dapat terpisahkan dengan politik, karena pemilu merupakan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia mulai dari pemilihan Presiden dan wakil Presiden, pilkada, dan pemilu legislatif secara langsung merupakan gambaran dari berjalannya sistem demokrasi di negara ini. Meskipun demikian proses demokrasi selama ini belum sepenuhnya menggambarkan masyarakat paham akan arti demokrasi (Kumorotomo, 2016). Masyarakat kelurahan yang rata-rata masih berpendidikan rendah, yang kemudian dalam memahami politik hanya sebatas pesta rakyat yang dilakukan setiap lima tahun sekali, dan tidak sedikit partisipasi politik yang dilakukan masyarakat masih dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan dari pihak-pihak yang berkuasa termasuk aparatur pemerintahan (Funome et al., 2012). Berdasarkan hal tersebut maka, peran aparatur pemerintah kelurahan sangatlah penting diperlukan dengan keadaan masyarakat yang tidak memiliki bekal Pendidikan resmi yang cukup dan minim dalam kesadaran politik, hal ini yang kemudian tergambar di Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen Kota Serang. Harapannya dengan adanya peran dari aparatur pemerintahan yang kemudian dapat

mengatasi masalah-masalah yang mungkin saja bisa terjadi pada saat berlangsungnya pilkada serentak 2024.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah pembelajaran dengan menyampaikan teori mengenai partisipasi politik dalam menggunakan haknya dalam memilih, serta simulasi tentang pelaksanaan dari proses Pilkada Serentak 2024. Target kegiatan PKM ini adalah masyarakat di Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, Jl. Jalan Raya Banten KM 5 Kp. Sukabela Kasemen Serang. Beserta Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pamulang Kampus Serang. Kegiatan ini direncanakan akan diikuti oleh sekitar 100 orang peserta yang juga berkategori sebagai Pemilih dalam Pilkada 2024. Materi yang diberikan adalah pentingnya konsep pilkada pada level teori dan praktik lapangan. Dalam pemaparan materi, tim PKM memberikan penjelasan mengenai tema kegiatan, yaitu “Peran Aparatur Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Kelurahan Kasemen Kota Serang”.

Sosialisasi dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat dan pemuda ini ditujukan agar masyarakat kembali memiliki antusiasme, memahami prerefensi politiknya dan juga diharapkan partisipasi politik masyarakat ini bersifat otonom. Sehingga, semakin otonomnya seseorang dalam partisipasi politiknya maka akan semakin tinggi pemahaman pentingnya dirinya sebagai individu untuk bangsa, dan negaranya, juga diharapkan tingginya pemahaman dirinya dalam mencermati proses dan kegiatan politik. Selanjutnya, tim Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan simulasi lapangan. Dalam tahapan ini, peserta diminta untuk melakukan simulasi implementasi dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang mana masyarakat memilih surat suara Pilkada 2024 dan mendapatkan pemahaman yang baik dalam rangkaian proses Pilkada untuk berperan aktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Aparatur Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Peran aparatur pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi politik penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 di Kelurahan Kasemen, Kota Serang, sangat

penting. Beberapa langkah yang kemudian diambil oleh aparaturnya kelurahan untuk mendorong partisipasi politik masyarakat:

1. Edukasi Politik dan Sosialisasi

Aparatur kelurahan bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik. Ini meliputi penyebaran informasi tentang hak dan kewajiban warga negara, proses pemilu, dan pentingnya suara individu dalam menentukan kebijakan publik. Edukasi dan sosialisasi ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sehingga mereka lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi. Kelurahan Kasemen rutin menyelenggarakan pertemuan warga, yang mana dalam pertemuan rutin ini aparaturnya kelurahan Kasemen memberikan informasi berkaitan dengan proses Pilkada, pentingnya suara masyarakat, dan cara memberikan suara yang benar pada saat datang ke TPS. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah melalui seminar dan lokakarya mengenai partisipasi politik, ini merupakan salah satu cara efektif untuk mengedukasi masyarakat. Kegiatan ini melibatkan narasumber dari berbagai bidang, termasuk akademisi, aktivis, dan praktisi politik. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan mendalam tentang pentingnya partisipasi politik dan bagaimana cara berpartisipasi secara efektif.

Teknis dalam pelaksanaan kegiatan berlangsung seperti presentasi menyampaikan informasi melalui presentasi yang menarik dan interaktif. Diskusi kelompok membagi peserta ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Dan diakhiri dengan sesi tanya jawab memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan mendapatkan jawaban langsung dari narasumber.

2. Kampanye Informasi

Membuat kampanye informasi melalui media sosial dan pamflet adalah strategi lain yang efektif dilakukan oleh aparaturnya kelurahan Kasemen. Kampanye ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak orang dan menyebarkan informasi secara luas dan cepat. Dengan harapan informasi penting tentang hak dan kewajiban politik, serta proses pemilu, kepada masyarakat luas dapat dipahami dengan mudah. Teknis kegiatan ini dikemas oleh aparaturnya kelurahan melalui platform media sosial seperti facebook, instagram, dan twitter untuk menyebarkan pesan-pesan edukatif. Kemudian dengan cara mendistribusikan pamflet yang berisi informasi penting di tempat-tempat strategis seperti kantor kelurahan, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Dan terakhir dengan membagikan video edukatif yang menjelaskan pentingnya partisipasi politik dengan cara yang menarik

dan mudah dipahami. Hasil dan harapan yang ingin disampaikan oleh aparaturnya kelurahan kasemen melalui kampanye informasi tersebut yaitu masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai partisipasi politik, serta termotivasi untuk menggunakan hak pilih mereka.

3. Meningkatkan Kesadaran melalui Kegiatan Komunitas

Mengintegrasikan informasi Pilkada dalam kegiatan komunitas yang sudah ada, seperti arisan, pengajian, dan kegiatan gotong royong, untuk meningkatkan kesadaran secara informal dilakukan oleh aparaturnya kelurahan kasemen. Teknis kegiatan dilakukan dengan cara diskusi kelompok kecil tentang pentingnya Pilkada dalam setiap kegiatan komunitas. Selain itu terdapat kegiatan atau acara khusus seperti lomba atau kegiatan budaya yang bertema Pilkada untuk menarik minat warga.

4. Mendorong Keterlibatan Pemuda dan Kelompok Marginal

Memfokuskan upaya pada kelompok pemuda dan kelompok marginal yang sering kali kurang terlibat dalam proses politik merupakan salah satu langkah yang diambil oleh aparaturnya kelurahan Kasemen. Forum Pemuda atau kelompok diskusi pemuda yang secara khusus membahas isu-isu politik dan partisipasi dalam Pilkada dilakukan dengan mengadakan program-program khusus untuk kelompok marginal, seperti kaum disabilitas atau warga yang kurang terjangkau, agar mereka juga merasa terdorong untuk berpartisipasi.

5. Kolaborasi dengan Lembaga dan Organisasi Lokal

Bekerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya untuk memperluas jangkauan dan efektivitas sosialisasi. Seperti kerjasama dengan sekolah serta mengajak sekolah-sekolah untuk mengadakan kegiatan edukasi politik bagi siswa yang sudah memenuhi syarat usia memilih. Selain itu hal yang dilakukan adalah mengadakan kolaborasi dengan lembaga keagamaan. Menggunakan mimbar keagamaan untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang partisipasi dalam Pilkada.

6. Penyediaan Fasilitas Pendukung

Menyiapkan fasilitas yang mendukung kemudahan pemungutan suara seperti menyediakan transportasi bagi warga yang tinggal jauh dari TPS. Selain itu pemerintah kelurahan juga memastikan TPS diatur dengan baik, ramah disabilitas, dan mudah diakses.

B. Implementasi dan Tantangan Aparatur Pemerintah Kelurahan

Mengimplementasikan kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik, aparaturnya kelurahan mungkin menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh aparaturnya kelurahan Kasemen adalah mengenai keterbatasan sumber daya manusia, dimana jumlah aparaturnya kelurahan yang terbatas cukup menghambat pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien. Selain itu terdapat persoalan lain perihal anggaran untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi sangat terbatas. Tantangan lain yang menjadi perhatian aparaturnya kelurahan Kasemen adalah tingkat Pendidikan yang beragam. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang beragam memerlukan pendekatan yang berbeda pula dalam penyampaian informasi. Selain itu sulitnya menyampaikan informasi kompleks kepada masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang rendah.

Secara teknis kegiatan kemudian dikemas dengan baik oleh aparaturnya kelurahan Kasemen melalui pengembangan materi edukasi yang disesuaikan dengan berbagai tingkat pendidikan, menggunakan bahasa yang sederhana dan visual yang menarik. Selain itu dengan melatih kader-kader lokal yang dapat menjembatani kesenjangan pemahaman di masyarakat. Harapannya dengan menggunakan berbagai metode edukasi seperti visual, audio, dan praktik langsung untuk menjangkau masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan. Selain tantangan mengenai sumber daya manusia dan Pendidikan masyarakat, muncul tantangan lain yaitu mengenai apatisme masyarakat. Hal ini cukup menjadi perhatian khusus karena kelurahan Kasemen merupakan satu kelurahan yang berada ditengah Kota Serang. Ruang lingkup hidup kelurahan di perkotaan menjadi tantangan karena sebagian masyarakat mungkin menunjukkan sikap apatis atau tidak peduli terhadap politik, yang dapat mengurangi efektivitas kegiatan edukasi dan sosialisasi. Ketidakpercayaan terhadap sistem politik menjadi salah satu pengalaman buruk atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik dapat menyebabkan apatisme masyarakat.

Pendekatan personal dan door-to-door dilakukan oleh aparaturnya kelurahan Kasemen. Menggunakan pendekatan personal dan door-to-door untuk menjangkau individu yang menunjukkan sikap apatis, dengan fokus pada mendengarkan dan menjawab kekhawatiran mereka. Selain itu dilakukan testimoni dari tokoh masyarakat, hal ini dilakukan dengan mengajak tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk berbicara tentang pentingnya partisipasi politik, karena mereka biasanya memiliki pengaruh yang besar di

komunitas. Cara lain yang kemudian dilakukan yaitu menunjukkan kisah sukses dari daerah lain di mana partisipasi politik telah membawa perubahan positif, untuk memotivasi masyarakat. Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini secara strategis dan kreatif, aparatur kelurahan dapat meningkatkan efektivitas program edukasi dan sosialisasi, sehingga partisipasi politik masyarakat dapat meningkat secara signifikan, terlihat pada gambar 1 berikut



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PKM di Kelurahan Kasemen, Kota Serang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Aparatur pemerintah kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi, aparatur kelurahan Kasemen berupaya cukup keras dan konsisten

menyebarkan informasi tentang hak dan kewajiban warga negara, proses pemilu, dan pentingnya suara individu dalam menentukan kebijakan publik pada lingkungan masyarakat di Kelurahan Kasemen. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti keterbatasan sumber daya pada aparat Kelurahan yang kemudian terbagi atas beberapa divisi atau bagian yang memiliki tingkat pekerjaan masing-masing. Selain itu tingkat pendidikan yang beragam dalam lingkungan masyarakat Kelurahan Kasemen memberikan tantangan sendiri dalam proses edukasi, aparat kelurahan meberikan cara khusus dalam penanganan hal ini, agar masyarakat benar-benar paham mengenai arti penting partisipasi dalam pemilu. Dan apatisme masyarakat di perkotaan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat pemerintah kelurahan Kasemen, dalam memberikan informasi secara baik dan menyeluruh agar proses berlangsungnya pemilu berjalan dengan baik dan lancar.

Tantangan yang muncul kemudian dapat diatasi dengan strategi yang tepat oleh aparat Kelurahan Kasemen, seperti bermitra dengan lembaga lain, merekrut relawan, mengembangkan materi edukasi yang disesuaikan, dan menggunakan metode edukasi yang variatif. Selain itu, pendekatan personal dan melibatkan tokoh masyarakat dilakukan guna membantu mengatasi sikap apatis masyarakat. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, pemerintah Kelurahan Kasemen berharap partisipasi politik masyarakat dapat meningkat, sehingga demokrasi di tingkat lokal semakin kuat dan berkualitas.

B. SARAN

Saran atas temuan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat kelurahan Kasemen, sebagai berikut:

1. Peingkatan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala untuk aparat kelurahan agar lebih siap dalam melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi.
2. Megadakan kerjasama dengan institusi Pendidikan seperti universitas atau lembaga pendidikan untuk mengadakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi aparat kelurahan.
3. Pengembangan program berkelanjutan dengan program edukasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan kegiatan rutin kelurahan. Selain itu, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Mengembangkan platform digital

- seperti website atau aplikasi mobile yang berisi informasi tentang partisipasi politik dan kegiatan kelurahan.
4. Mengembangkan platform digital seperti website atau aplikasi mobile yang berisi informasi tentang partisipasi politik dan kegiatan kelurahan, hal ini dirasa penting karena dengan memanfaatkan media sosial secara maksimal untuk kampanye informasi dan edukasi politik.
 5. Melibatkan organisasi masyarakat, kelompok pemuda, dan komunitas lokal dalam setiap kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program. Membangun kemitraan dengan LSM yang bergerak di bidang pendidikan politik untuk mendapatkan dukungan sumber daya dan pengetahuan. Tindakan lainnya yang dapat dilakukan adalah membuat program penghargaan bagi warga yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Kemudian ditutup dengan adanya publikasi keberhasilan. Mempublikasikan kisah-kisah sukses dari warga atau kelompok yang berhasil meningkatkan partisipasi politik sebagai inspirasi bagi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. (2008). *Musyawaharah Dan Demokrasi Sebagai Dasar Etika Politik Islam*.
- Baidhawiy, Z. (2014). *Relasi Etika Dan Politik*. 1–37.
- Budiyono. (2019). *Menjaga Etika Dalam Berpolitik. Etika Politik Bermartabat*.
- Funome, P. I., Hardianto, W. T., & Setyawan, D. (2012). *Peran Etika Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. 1(2), 9–15.
- Huntington, S.P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Rineka Cipta.
- Ilham, M. (2012). *Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi*. 1(1), 375–395.
- Kumorotomo, W. Dkk. (2016). *Etika Publik*.
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Institute For Democracy And Welfarism.
- Putuhena, M. I. F. (2013). Political Laws Of Legislation: Reinforce Progressive Legislation Reform. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(3), 375–395.
- Risnain, M. (2012). *Konsep Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Program Legislasi Nasional: Rekomendasi Konseptual Dan Kebijakan Pada Prolegnas 2015-2019*. 1(1), 375–395.
- Sholikin, A. (2013). *Pemikiran Politik Negara Dan Agama “ Ahmad Syafii Maarif .”* 194–203.
- Stone, D. (2012). *Policy Paradox (The Art Political Decision Making)* (A. Javscas (Ed.); Ed. 3). W.W. Norton & Company.